

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

a2f72863b1308a2835abb0c22b0777175e2766c6e767cbf62732b784734690dd

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

AKSES DAN KONTROL RUMAH TANGGA PETANI DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN RAKYAT

(Access and Control of Farm Households in the Management of Private Forest Resources)

Eva Fauziyah¹

¹Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry
Jl. Raya Ciamis-Banjarnegara Km. 4 Ciamis 46201 Telp. (0265) 771352, Fax. (0265) 775866
e-mail: fauziah_eva@yahoo.com

Diterima 24 Oktober 2018, direvisi 1 November 2018, disetujui 21 Desember 2018

ABSTRACT

Differences in access of natural resources between men and women is one of the causes of gender inequality. This condition may have an impact on the lack of control, benefit, and participation of women on farming activities. This study aims to analyze the gender relation pattern in private forest management in Banyumas and Banjarnegara Districts. Data were collected by using questionnaire, interview with farmer (men and women) and farmer groups with Socio Economic and Gender Analysis (SEAGA) instrument. Total respondents were 64 private forest farmers who were randomly selected. Data were analyzed by tabulation, percentage and Equality and Equity Index (EEI). The results showed that access in private forest management were dominated by men e.g access on land, crops cultivated, education, training, extension services, capital, credit, equipment, nursery, fertilization, cropping pattern, and pest and disease control. In contrary, women were more dominant in post harvest processing, and marketing activities. In Banyumas District, women control were dominant in marketing, while in Banjarnegara District, there was no dominance in both resources and stage activities but access and control were undertaken jointly between men and women in crops cultivation, watering, fertilization and marketing. The pattern of gender relations in general was more dominant both in terms of resources and the stages activities of private forest as indicated by EEI value that is less than 0,5.

Keywords: access, control, private forest, gender relation pattern

ABSTRAK

Perbedaan akses terhadap sumber daya alam antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan gender. Kondisi ini pada akhirnya dapat berdampak pada lemahnya kontrol, manfaat, dan partisipasi perempuan dalam kegiatan usahatani secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola relasi gender dalam pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara pada Bulan Mei sampai dengan Juli 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan instrument Analisis Gender (*Socio Economic and Gender Analysis—SEAGA*), dimana pengumpulan data dilakukan secara partisipatif pada kelompok tani dan wawancara pada tingkat keluarga petani. Total responden berjumlah 64 petani hutan rakyat yang dipilih secara acak (laki-laki dan perempuan). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tabulasi, persentase dan menggunakan Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses dalam pengelolaan hutan rakyat didominasi oleh laki-laki seperti akses terhadap lahan, komoditas yang diusahakan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan pertanian, modal, kredit, peralatan, pembibitan, pemupukan, pola tanam, serta pengendalian hama dan penyakit, sedangkan perempuan hanya lebih dominan dalam pengolahan pascapanen dan pemasaran. Pada aspek kontrol di Kabupaten Banyumas, perempuan mendominasi pada tahapan kegiatan pemasaran, sementara di Kabupaten Banjarnegara tidak ada dominasi baik pada sumberdaya maupun tahapan kegiatan pengelolaan hutan rakyat, namun kontrol terhadap komoditas yang diusahakan, penyiraman, pemupukan dan pemasaran dilakukan secara bersama-sama. Pola relasi gender secara umum lebih dominan baik terhadap sumberdaya maupun tahapan kegiatan hutan rakyat yang ditunjukkan oleh nilai IKKG yang lebih kecil dari 0,5.

Kata kunci: akses, kontrol, hutan rakyat, pola relasi gender

I. PENDAHULUAN

Pengertian gender berbeda dengan pengertian seks/jenis kelamin. Pembagian jenis kelamin ditentukan oleh organ biologis yang melekat secara permanen dan fungsinya tidak dapat dipertukarkan (Fakih, 2007). Sementara itu, gender merupakan pemilahan peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan, bagian konsepsi pengorganisasian "pembagian kerja", baik dalam keluarga, rumah tangga, masyarakat luas, dan merupakan bagian dari kehidupan sosial budaya, dimana perbedaan keduanya adalah sebuah keniscayaan (Elizabeth, 2007).

Terkait dengan pemilahan peran dan hubungan laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya alam, berbagai organisasi bekerja untuk mengkaji mengenai pentingnya keberadaan kepemilikan dan kontrol perempuan terhadap aset untuk berbagai hasil pembangunan, baik untuk perempuan sendiri dan untuk keluarga mereka (Ruth Meinzen-Dick *et al.*, 2011). Namun, pria pada umumnya diuntungkan dalam kepemilikan aset, mengingat norma gender yang mengatur kepemilikan aset dimana pria cenderung memiliki lebih banyak aset dan bernilai tinggi daripada wanita, dan membangun aset perempuan telah menjadi prioritas pembangunan global (Deere, Oduro, Swaminathan, & Doss, 2013), beberapa intervensi pertanian juga mempertimbangkan dampak terhadap aset pada tingkat individu atau bahkan rumah tangga (Johnson, Kovarik, Meinzen-Dick, Njuk, & Quisumbing, 2016). Kondisi ini juga ditemui di Indonesia, dimana sebagian masyarakatnya menerapkan sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemenang dan mendominasi dalam sistem social termasuk penguasaan aset.

Kemajuan zaman, tuntutan ekonomi keluarga serta kebutuhan akan tenaga kerja wanita telah mengubah pola pikir wanita Indonesia. Saat ini banyak wanita yang masuk ke dunia kerja dan terlibat dalam sektor publik, tetapi banyak juga wanita yang memilih pekerjaan domestik. Hal ini

dikarenakan mereka menyadari peran gender wanita dalam mendidik anak, mengurus keluarga, merawat serta mengelola rumah, sehingga memilih pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah (Sari, Purnomo, & Rahayu, 2009).

Perempuan menjadi bagian yang penting dari tenaga kerja di sektor pertanian, baik itu pada penyediaan sarana pertanian, budidaya tanaman dan ternak, pengolahan dan pascapanen, hingga pemasaran hasil pertanian (Yuwono, 2013). Hal yang sama juga terjadi pada pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan. Namun, peran perempuan pada pengelolaan tanaman non kayu terlihat lebih besar dibandingkan pada pengelolaan tanaman kayu. Peran tersebut terlihat jelas terutama pada kegiatan pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Peran laki-laki lebih banyak pada kegiatan yang membutuhkan tenaga, sedangkan perempuan pada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kesabaran dan ketelatenan (Fauziyah, Firdaus, & Sanudin, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola relasi gender dalam pengelolaan hutan rakyat.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pengamatan lapangan dan wawancara dilakukan di empat desa yaitu Desa Kemawi Kecamatan Somagede dan Desa Baseh Kecamatan Kedungbanteng di Kabupaten Banyumas serta Desa Kebutuhduwur Kecamatan Pagedongan dan Desa Bondolharjo Kecamatan Punggelan di Kabupaten Banjarnegara pada bulan Mei sampai dengan Juli 2012. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian diantaranya adalah pengelolaan lahan di keempat desa ini didominasi oleh hutan rakyat dan di dalam pengelolaannya melibatkan tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan.

Dalam proses penulisan naskah ini ada beberapa kendala yang dihadapi, sehingga baru dapat diterbitkan, namun demikian kondisinya dianggap masih relevan karena kondisi pembagian kerja petani dalam pengelolaan hutan rakyat tidak mengalami banyak perubahan.

B. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data primer dilakukan secara partisipatif melalui diskusi, wawancara, pengisian kuesioner, dan pengamatan langsung terhadap pengelolaan hutan rakyat di lokasi penelitian. Data primer yang dikumpulkan berupa data akses dan kontrol petani baik laki-laki maupun perempuan terhadap sumberdaya hutan rakyat pada beberapa tahapan kegiatan di hutan rakyat. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian dan studi pustaka yang berhubungan dengan bidang penelitian. Data sekunder tersebut diantaranya adalah data luasan hutan rakyat, dan data pengelolaan hutan rakyat pada umumnya di lokasi penelitian.

Sampel responden adalah anggota kelompok tani yang dipilih secara acak (*random sampling*) yang terdiri dari laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 32 orang (total 64 orang). Dari seluruh anggota kelompok tani yang ada, dipilih dengan menggunakan nomor undian dan diambil sebanyak 64 nomor undian secara acak.

Dengan menggunakan pendekatan instrumen Sosial Ekonomi dan Analisis Gender (*Socio Economic and Gender Analysis-SEAGA*) secara partisipatif (Hartomo, 2007), diperoleh informasi tentang bagaimana laki-laki dan perempuan mengalokasikan sumberdaya dalam pengelolaan hutan rakyat seperti lahan, palawija, informasi, pendidikan, pelatihan, penyuluhan pertanian, hasil penjualan, kredit, modal, dan peralatan kerja dan bagaimana tahapan-tahapan kegiatan pengelolaan hutan rakyat dilakukan meliputi: pengolahan tanah, pembibitan, pola tanam, pemupukan, pemeliharaan, penyiraman, pengendalian

hama dan penyakit, pengolahan hasil panen, dan pemasaran hasil.

Pada setiap tahapan tersebut pendapat responden dipilih menurut pendapat laki-laki dan perempuan. Pendapat tersebut dituangkan dalam bentuk jawaban apakah lebih banyak laki-laki (L), lebih banyak perempuan (P) atau keduanya (LP) pada akses dan kontrol terhadap sumberdaya maupun terhadap tahapan kegiatan. Pendapat petani laki-laki dan perempuan baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif selanjutnya dianalisis menggunakan tabulasi dan persentase untuk melihat pola relasi (hubungan) laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri (suami-isteri) dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan rakyat (Hartomo, 2007). Secara kuantitatif pola relasi gender petani dalam melakukan kegiatan hutan rakyat ditunjukkan dalam bentuk nilai Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG). Secara matematis, angka IKKG dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKKG = \frac{p_o/(1 - p_o)}{p_1/(1 - p_1)}$$

dimana:

- p_o = proporsi perempuan yang mempunyai karakteristik tertentu
- $1 - p_o$ = proporsi perempuan yang mempunyai karakteristik lainnya
- p_1 = proporsi laki-laki yang mempunyai karakteristik yang sama
- $1 - p_1$ = proporsi laki-laki yang mempunyai karakteristik lainnya

Pola relasi gender secara kuantitatif ditunjukkan dalam bentuk angka IKKG seperti ditunjukkan Tabel 1.

Tabel 1. Nilai IKKG dan klasifikasi pola relasi laki-laki dan perempuan
 Table 1. *EEl value and relation pattern classification of men and women*

No. (No.)	IKKG (EEI)	Klasifikasi (Classification)	Simbol (Symbol)
1.	$0.0 < IKKG \leq 0.50$	Dominan Laki-laki	DL
2.	$0.5 < IKKG \leq 1.0$	Bersama-sama	BS
3.	$IKKG > 1.0$	Dominan Perempuan	DP

Keterangan (Remarks): DL = Dominan laki-laki; BS = Laki-laki dan perempuan sama-sama dominan; DP = Dominan perempuan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Hutan Rakyat di Lokasi Penelitian

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas hutan rakyat 623.200 ha. Kabupaten Banjarnegara memiliki luas hutan rakyat 5,49% dari luas hutan rakyat di Jawa Tengah yaitu 34.185,10 ha (Dirjen BPDAS-PS dan PT Surveyor Indonesia, 2011). Secara umum petani hutan rakyat di Kabupaten Banjarnegara menerapkan sistem agroforestri melalui kombinasi antara tanaman kayu dengan tanaman semusim. Tanaman kayu yang dominan adalah sengon (*Paraserianthes falcataria*). Jenis-jenis tanaman yang tumbuh baik di Kabupaten Banjarnegara terbagi dalam tiga zona, yaitu 1) Zona Utara (daerah pegunungan): kayu putih (*Eucaplyptus alba*), kopi (*Coffea arabica*) sebagai tanaman pokok, dan kentang (*Solanum tuberosum* L), kubis (*Brassica oleracea* var. Capitata), jagung (*Zea mays*) sebagai tanaman semusim; 2) Zona Tengah (daerah datar) meliputi sengon (*Paraserianthes falcataria*) dan jabon (*Anthocephalus cadamba*) sebagai tanaman pokok, dan kapulaga (*Amomum cordammum*), pisang (*Musa paradisiaca*), salak (*Salacca zalacca*) sebagai tanaman semusim; dan 3) Zona Selatan (daerah gelombang, kering) meliputi pinus (*Pinus merkusii*), damar (*Agathis damara*) sebagai tanaman pokok, dan ketela pohon (*Manihot esculenta*) sebagai

tanaman semusim (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banjarnegara, 2011).

Kabupaten Banyumas memiliki hutan rakyat yang tersebar hampir di seluruh kecamatan dengan dominasi sengon. Sementara tanaman non kayu yang potensial di Kabupaten Banyumas adalah cengkeh (*Syzigium aromaticum*), pala (*Myristica fragrans*), kelapa (*Cocos nucifera*), lada (*Piper nigrum*) dan lain sebagainya. Kabupaten Banyumas memiliki luas hutan rakyat 38.955,89 ha (6,25% dari luas total hutan rakyat di Jawa Tengah). Petani hutan rakyat di Kabupaten Banyumas juga menerapkan pola agroforestri melalui kombinasi antara tanaman kayu dengan tanaman semusim. Hutan rakyat pada umumnya didominasi oleh jenis sengon, namun belakangan ini minat masyarakat untuk menanam sengon mulai menurun.

Berdasarkan ketinggian tempat, pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Banyumas dibagi menjadi tiga tipe yakni: 1) bagian barat, didominasi oleh jenis jati (*Tectona grandis*), ketinggian sampai 150 m dpl, 2) bagian tengah, didominasi oleh jenis albasia sedangkan jati tidak cocok karena dingin (lereng kaki Gunung Slamet), ketinggian sampai 300 m dpl, 3) bagian timur, didominasi oleh jenis albasia, ketinggian sekitar 150 m dpl (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas, 2011).

Jenis-jenis tanaman non kayu di Kabupaten Banyumas yang merupakan tanaman perkebunan dan dikembangkan secara agroforestri yaitu kelapa, cengkeh, vanili (*Vannili planifolia*), lada, pala, kapulaga, dan tanaman empon-empon seperti jahe (*Zingiber Officinale*), kunyit (*Curcuma Domestica* Val), kencur (*Kaempferia Galangan*), lengkuas (*Alpinia Galanga* Sw) dan lain sebagainya. Salak juga ditemukan di Kabupaten Banyumas khususnya Kecamatan Kedungbanteng, namun produksinya tidak banyak.

Pengelolaan hutan rakyat secara umum di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara memiliki kesamaan dalam

setiap tahapannya. Tahapan hutan rakyat meliputi pemilihan dan penyediaan bibit, persiapan lahan dan penanaman, pemeliharaan (pembersihan gulma/rumput, pemupukan, penyemprotan hama penyakit tanaman (HPT), penyulaman, penjarangan, pemangkasan), serta pemanenan.

Penyediaan bibit tanaman kayu untuk hutan rakyat kebanyakan dilakukan dengan membeli dari pasar atau pedagang keliling, berupa anakan yang tumbuh sendiri, bantuan pemerintah maupun membibitkan sendiri. Sementara untuk bibit tanaman pertanian atau tanaman non kayu banyak diperoleh dengan cara membeli. Persiapan lahan dilakukan dengan pembersihan lahan, pembuatan lubang tanaman dan pemberian pupuk dasar dan sebagian adapula yang menerapkan sistem cemplongan. Pemeliharaan terhadap hutan rakyat khususnya tanaman kayu pada umumnya tidak dilakukan secara intensif. Pemupukan hanya dilakukan di awal tanam atau setelah tanaman di panen. Pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang dan pupuk kimia. Penyulaman, pemangkasan dan penjarangan dilakukan sesuai kondisi tanaman dan ketersediaan modal. Sementara penyemprotan untuk hama penyakit jarang dilakukan terlebih untuk tanaman kayu.

Pemanenan tanaman kayu sebagian besar dilakukan dengan sistem tebang pilih tetapi secara borongan karena dinilai lebih praktis. Proses penjualan atau pemasaran dilakukan secara individu ke bandar/tengkulak yang datang ke rumah atau ke kebun. Sementara untuk tanaman non kayu dilakukan dirumah atau dipasar, dengan harapan mendapat nilai jual yang lebih tinggi.

B. Akses dan Kontrol Rumahtangga Petani

Akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan tahapan kegiatan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara menurut para responden laki-laki dan

perempuan dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Baik di Kabupaten Banyumas maupun di Kabupaten Banjarnegara persentase akses dan kontrol laki-laki secara umum terlihat lebih besar. Menurut Septiadi dan Wigna (2013) perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang mengarah pada praktik ketimpangan gender dapat diidentifikasi dengan melihat keterlibatan peran antara laki-laki dan perempuan dalam aktivitas, akses dan kontrol dalam rumah tangga.

Akses dan kontrol laki-laki di Kabupaten Banjarnegara lebih tinggi dibandingkan di Kabupaten Banyumas dan sebaliknya akses dan kontrol perempuan di Kabupaten Banjarnegara cenderung lebih rendah di bandingkan di Kabupaten Banyumas. Hal ini dimungkinkan karena jenis penyusun hutan rakyat yang berbeda dan adanya beberapa keluarga petani di Banyumas yang bekerja tidak hanya di sektor pertanian, sehingga pada waktu-waktu tertentu beberapa kegiatan di hutan rakyat banyak dilakukan perempuan.

Wujud kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga terdiri dari akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Dalam penelitian ini wujud kesetaraan dan keadilan gender dibatasi pada aspek akses dan kontrol. Akses menurut Puspitawati (2012) didefinisikan sebagai kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat, dengan kata lain akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumberdaya alam. Sementara kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.

Tabel 2. Akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan tahapan kegiatan menurut responden di Kabupaten Banyumas
 Table 2. *Acces and control to resources and stage of activities according to respondents in Banyumas District*

Uraian (Descriptions)	Akses (Access)				Kontrol (Control)			
	Responden petani laki-laki (Men farmer respondent)		Responden petani perempuan (Women farmer respondent)		Responden petani laki-laki (Men farmer respondent)		Responden petani perempuan (Women farmer respondent)	
	L (%)	P (%)	L (%)	P (%)	L (%)	P (%)	L (%)	P (%)
Sumberdaya (Resources)								
1. Lahan hutan rakyat (<i>Private forest land</i>)	62,5	50,0	100	37,5	68,8	37,5	68,8	37,5
2. Komoditas yang diusahakan (<i>Crops cultivated</i>)	81,3	25,0	93,8	93,8	87,5	18,8	87,5	18,8
3. Informasi (<i>Information</i>)	87,5	18,8	93,8	43,8	87,5	18,8	87,5	18,8
4. Pendidikan (<i>Education</i>)	87,5	25,0	100	25	93,8	12,5	93,8	12,5
5. Pelatihan (<i>Training</i>)	93,8	68,8	100	18,8	81,3	25	81,3	25
6. Penyuluhan pertanian (<i>Agricultural extention</i>)	7,5	18,8	100	50	93,8	18,8	93,8	18,75
7. Hasil penjualan (<i>Sales revenue</i>)	93,8	43,8	50	68,8	87,5	37,5	75	37,5
8. Modal (<i>Capital</i>)	93,8	37,5	93,8	37,5	87,5	37,5	87,5	37,5
9. Kredit (<i>Credit</i>)	93,8	37,5	87,5	31,3	81,3	31,3	81,3	31,3
10. Peralatan Kerja (<i>Equipment</i>)	93,8	37,5	100	25	75	31,3	75	31,3
Tahapan Kegiatan(Stage of activity)								
1. Pengolahan lahan (<i>Land cultivation</i>)	93,8	25,0	93,8	50	81,3	25	81,3	25
2. Pembibitan (<i>Nursery</i>)	93,8	25,0	87,5	75	75	31,3	75	31,3
3. Pola tanam (<i>Cropping pattern</i>)	93,8	31,3	87,5	56,3	75	37,5	75	37,5
4. Pemupukan (<i>Fertilization</i>)	93,8	31,3	87,5	62,5	87,5	25	87,5	37,5
5. Pemeliharaan (<i>Maintenance</i>)	93,8	31,3	87,5	75,0	87,5	31,3	87,5	37,5
6. Penyiraman (<i>Watering</i>)	93,8	31,3	87,5	75,0	81,3	31,3	81,3	31,3
7. Pengendalian hama dan penyakit (<i>Pest and disease control</i>)	93,8	31,3	87,5	75,0	81,3	31,3	81,3	31,3
8. Pengolahan pascapanen (<i>Post harvest processing</i>)	25,0	100	50	100	81,3	43,8	81,3	43,8
9. Pemasaran(<i>Marketing</i>)	56,3	87,5	50	81,3	69,2	75	56,3	75

Sumber (Source): Data primer (*Primary data*), 2012

Tabel 3. Akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan tahapan kegiatan menurut responden di Kabupaten Banjarnegara
 Table 3. *Acces and control to resources and stage of activities according to respondents in Banjarnegara District*

Uraian (Descriptions)	Akses (Access)				Kontrol (Control)			
	Responden petani laki- laki (Men farmer respondent)		Responden petani perempuan (Women farmer respondent)		Responden petani laki- laki (Men farmer respondent)		Responden petani perempuan (Women farmer respondent)	
	L (%)	P (%)	L (%)	P (%)	L (%)	P (%)	L (%)	P (%)
Sumberdaya (Resources)								
1. Lahan hutan rakyat (<i>Private forest land</i>)	62,5	62,5	87,5	50	62,5	43,8	62,5	43,8
2. Komoditas yang diusahakan (<i>Crops cultivated</i>)	93,8	25	93,8	81,3	62,5	50	62,5	50
3. Informasi (<i>Information</i>)	93,8	25	87,5	87,5	62,5	31,3	75	31,3
4. Pendidikan (<i>Education</i>)	100	18,8	87,5	81,3	87,5	31,3	25	31,3
5. Pelatihan (<i>Training</i>)	100	25	81,3	62,5	87,5	18,8	87,5	18,8
6. Penyuluhan pertanian (<i>Agricultural extention</i>)	100	18,8	81,3	75	18,8	31,3	81,3	25
7. Hasil penjualan (<i>Sales revenue</i>)	93,8	43,8	68,8	100	81,3	31,3	81,3	31,3
8. Modal (<i>Capital</i>)	100	255	100	81,3	81,3	31,3	81,3	31,3
9. Kredit (<i>Credit</i>)	100	31,3	100	87,5	81,3	37,5	75	37,5
10. Peralatan Kerja (<i>Equipment</i>)	100	6,3	100	62,5	87,5	18,8	87,5	18,8
Tahapan Kegiatan (Stage of activity)								
1. Pengolahan lahan (<i>Land cultivation</i>)	87,5	25	81,3	81,3	87,5	18,8	87,5	18,8
2. Pembibitan (<i>Nursery</i>)	100	18,8	81,3	87,5	81,3	25	87,5	25
3. Pola tanam (<i>Cropping pattern</i>)	100	18,8	81,3	81,3	75	37,5	68,8	43,8
4. Pemupukan (<i>Fertilization</i>)	100	18,8	75	93,8	25	37,5	75	37,5
5. Pemeliharaan (<i>Maintenance</i>)	87,5	37,5	68,8	93,8	75	43,8	75	50
6. Penyiraman (<i>Watering</i>)	87,5	31,3	68,8	100	81,3	31,3	81,3	31,3
7. Pengendalian hama dan penyakit (<i>Pest and disease control</i>)	87,5	31,3	75	75	87,5	25	87,5	25
8. Pengolahan pascapanen (<i>Post harvest processing</i>)	62,5	93,8	62,3	93,8	75	50	68,8	43,8
9. Pemasaran (<i>Marketing</i>)	56,3	93,8	81,3	56,3	62,5	50	50	50

Sumber (Source): Data primer (*Primary data*), 2012

Berdasarkan Tabel 2 dan 3 dapat dilihat bahwa menurut responden laki-laki dan perempuan, akses terhadap sumberdaya dan tahapan kegiatan pengelolaan hutan rakyat lebih didominasi oleh laki-laki. Dominasi laki-laki tersebut terutama terhadap sumberdaya seperti lahan hutan rakyat, komoditas yang diusahakan, informasi, pendidikan, pelatihan, penyuluhan pertanian,

modal, kredit, dan peralatan kerja. Demikian halnya akses terhadap tahapan kegiatan pengelolaan hutan rakyat seperti pengolahan lahan, ppembibitan, pola anam, pemupukan, penyiraman, dan pengendalian hama dan penyakit.

Perempuan terlibat pada sektor pertanian karena perempuan memiliki rasa tanggung jawab dan kepemilikan yang besar

terhadap keluarga. Perempuan lebih responsif dalam mengatasi persoalan pangan keluarga dan upaya peningkatan pendapatan dibandingkan laki-laki, sehingga kesempatan bekerja di luar rumah diperoleh oleh para petani perempuan (Farmia, 2006). Elizabeth (2007) menyatakan bahwa keberadaan perempuan yang mau bekerja membantu laki-laki sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Keadaan ini tergambar dalam setiap tahapan kegiatan usahatani yang dilakukan, mulai dari pembibitan hingga pengolahan hasil panen dan pemasaran. Pekerjaan mengurus dan mengatur rumah tangga (*domestic work*), meski tidak memberi penghasilan langsung, pada dasarnya merupakan pekerjaan yang ekonomis produktif.

Akses terhadap informasi yang dimiliki oleh laki-laki di lokasi penelitian relatif lebih besar dibandingkan dengan perempuan.. Laki-laki lebih dominan dalam mengakses informasi dari televisi dimana televisi merupakan sumber informasi utama karena televisi menjadi satu-satunya sumber informasi elektronik di desa. Demikian pula akses laki-laki terhadap sumber informasi yang berupa pendidikan, penyuluhan, pelatihan ataupun brosur juga relatif dominan. Bagi laki-laki (suami), peran perempuan dalam hal penyuluhan dan brosur hanya sekedar diberi tahu saja, tanpa harus dilibatkan secara langsung. Hal inilah yang mengakibatkan informasi-informasi yang bisa menambah pengetahuan dan keterampilan tidak bisa diperoleh dengan maksimal oleh perempuan. Seperti hasil penelitian E.W. Chirwa, Mvula, Dorward, and Matita. (2011) dan Smale (2011), yang menunjukkan bahwa karena hal tersebut menyebabkan petani perempuan di negara yang sedang berkembang tingkat adopsi terhadap teknologi penggunaan jenis bibit modern menjadi lebih rendah dibandingkan laki-laki, walaupun hubungan antara gender dan adopsi biasanya tidak signifikan.

Hal tersebut juga terkait dengan peran dan status wanita dalam mengurus rumah tangga seperti dinyatakan oleh Elizabeth

(2007) bahwa dalam semua strata peran dan status perempuan dalam mengurus keberlangsungan rumah tangga terindikasi lebih tinggi dibanding laki-laki (kepala keluarga). Masih menurut Elizabeth (2007), pada dasarnya wanita memiliki peranan ganda dalam rumah tangga yakni: 1) peran kerja sebagai ibu rumah tangga, meski tidak langsung menghasilkan pendapatan, secara produktif bekerja mendukung kaum pria (kepala keluarga) untuk mencari penghasilan (uang); dan 2) berperan sebagai pencari nafkah (tambahan ataupun utama).

Perempuan di kedua kabupaten mempunyai akses yang lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki dalam pengolahan hasil panen dan pemasaran. Hal ini ditandai dengan besarnya peluang dan kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk secara langsung bernegosiasi dengan pedagang atau pembeli yang akan membeli hasil pertanian mereka. Dalam hal ini, laki-laki hanya sekedar diberikan informasi oleh perempuan terkait dengan pola distribusi dan penjualan mereka dan hasil penjualannya pun sepenuhnya diorientasikan untuk kebutuhan sehari-hari bagi semua anggota keluarga. Dominasi perempuan di sektor pertanian tersebut telah berlangsung lama dan dipandang sebagai sesuatu yang wajar (Wahyuni, 2007). Oleh karena itu, perempuan petani harus diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh akses kepada lahan dan sumberdaya yang lain, seperti kredit, teknologi, dan pengetahuan.

Laki-laki dan perempuan memiliki akses yang hampir sama dalam kegiatan pemeliharaan di hutan rakyat. Hal ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa petani perempuan mempunyai akses yang sama dengan laki-laki dalam peningkatan input pertanian seperti pemupukan, persemaian, peningkatan hasil jagung sebanyak 16% di Malawi, 17% di Ghana dan 19% di Kenya Barat (World_Bank, 2012).

Implementasi program pembangunan pertanian di tingkat desa menunjukkan akses laki-laki terhadap program pembangunan lebih besar dibanding perempuan (Hastuti, 2004). Paradigma modernisasi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian yang mengutamakan prinsip efisiensi, secara nyata telah mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan pada masyarakat petani, baik struktur sosial, budaya dan politik terutama pada struktur ekonomi di perdesaan. Alokasi sumberdaya pertanian terbukti tidak memberikan kesempatan yang sama

berdasarkan gender. Penerapan teknologi pertanian modern telah meminggirkan bahkan menghilangkan akses dan kontrol perempuan petani khususnya pada aspek budidaya (Hesti, 2012). Proyek-proyek pembangunan tidak banyak melibatkan perempuan, sehingga dalam introduksi teknologi pertanian petani perempuan tidak memperoleh akses sebagaimana pada petani laki-laki.

Nilai IKKG di kedua lokasi penelitian untuk setiap variabel sumberdaya dan tahapan kegiatan hutan rakyat pada aspek akses dan kontrol disajikan dalam Tabel 4 dan 5.

Tabel 4. Nilai IKKG untuk setiap variabel sumberdaya dan tahapan kegiatan di Kabupaten Banyumas
Table 4. *EEl value for every variable of resources and stage of activities in Banyumas District*

Uraian (Description)	Akses (Acces)		Kontrol (Control)	
	IKKG (EEI)	Klasifikasi (Clasification)	IKKG (EEI)	Klasifikasi (Clasification)
Sumberdaya (Resources)				
1. Lahan hutan rakyat (<i>Private forest land</i>)	0,3	DL	0,3	DL
2. Komoditas yang diusahakan (<i>Crops cultivated</i>)	0,31	DL	0,05	DL
3. Informasi (<i>Information</i>)	0,1	DL	0,05	DL
4. Pendidikan (<i>Education</i>)	0,07	DL	0,02	DL
5. Pelatihan (<i>Training</i>)	0,15	DL	0,09	DL
6. Penyuluhan pertanian (<i>Agricultural extention</i>)	0,1	DL	0,04	DL
7. Hasil penjualan (<i>Sales revenue</i>)	0,8	BS	0,21	DL
8. Modal (<i>Capital</i>)	0,16	DL	0,18	DL
9. Kredit (<i>Credit</i>)	0,14	DL	1,15	DL
10. Peralatan kerja (<i>Equipment</i>)	0,1	DL	0,17	DL
Tahapan Kegiatan (Stage of Activity)				
1. Pengolahan lahan (<i>Land cultivation</i>)	0,14	DL	0,09	DL
2. Pembibitan (<i>Nursery</i>)	0,23	DL	0,17	DL
3. Pola tanam (<i>Cropping pattern</i>)	0,21	DL	0,25	DL
4. Pemupukan (<i>Fertilization</i>)	0,24	DL	0,12	DL
5. Pemeliharaan (<i>Maintenance</i>)	0,29	DL	0,15	DL
6. Penyiraman (<i>Watering</i>)	0,29	DL	0,15	DL
7. Pengendalian hama dan penyakit (<i>Pest and disease control</i>)	0,29	DL	0,15	DL
8. Pengolahan hasil hutan (<i>Post harvest processing</i>)	8,00	DP	0,29	DL
9. Pemasaran (<i>Marketing</i>)	2,53	DP	1,44	DP

Sumber (Source): Data primer (*Primary data*), 2012

Keterangan (Remarks): DL = Dominan Laki-laki; BS= Laki-Laki dan Perempuan sama-sama dominan; DP = Dominan Perempuan

Tabel 5. Nilai IKKG untuk setiap variabel sumberdaya dan tahapan kegiatan di Kabupaten Banjarnegara
 Table 5. EEI value for every variable of resources and stage of activities in Banjarnegara District

Uraian (Description)	Akses (Acces)		Kontrol (Control)	
	IKKG (EEI)	Klasifikasi (Clasification)	IKKG (EEI)	Klasifikasi (Clasification)
Sumberdaya (Resources)				
1. Lahan hutan rakyat (Private forest land)	0,57	BS	0,49	DL
2. Komoditas yang diusahakan (Crops cultivated)	0,23	DL	0,64	BS
3. Informasi (Information)	0,27	DL	0,21	DL
4. Pendidikan (Education)	0,17	DL	0,63	BS
5. Pelatihan (Training)	0,19	DL	0,05	DL
6. Penyuluhan pertanian (Agricultural Extention)	0,17	DL	0,51	BS
7. Hasil penjualan (Sales revenue)	0,68	BS	0,15	DL
8. Modal (Capital)	0,2	DL	0,15	DL
9. Kredit (Credit)	0,27	DL	0,23	DL
10. Peralatan kerja (Equipment)	0,04	DL	0,05	DL
Tahapan Kegiatan (Stage of Activity)				
1. Pengolahan lahan (Land cultivation)	0,29	DL	0,05	DL
2. Pembibitan (Nursery)	0,20	DL	0,09	DL
3. Pola tanam (Cropping pattern)	0,19	DL	0,32	DL
4. Pemupukan (Fertilization)	0,23	DL	0,75	BS
5. Pemeliharaan (Maintenance)	0,58	BS	0,39	DL
6. Penyiraman (Watering)	0,52	BS	0,15	DL
7. Pengendalian hama dan penyakit (Pest and disease control)	0,36	DL	0,08	DL
8. Pengolahan hasil hutan (Post harvest processing)	2,25	DP	0,42	DL
9. Pemasaran (Marketing)	1,15	DP	0,8	BS

Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2012

Keterangan (Remarks): DL = Dominan Laki-laki; BS= Laki-Laki dan Perempuan sama-sama dominan; DP = Dominan Perempuan

Pada Tabel 4 dan 5 terlihat bahwa sebagian besar akses maupun kontrol terhadap sumberdaya dan tahapan kegiatan didominasi oleh laki-laki yang ditunjukkan oleh nilai IKKG sebesar kurang dari 0,5. Terdapat dua variabel akses di Kabupaten Banyumas maupun di Kabupaten Banjarnegara yang didominasi oleh perempuan yaitu akses terhadap pengolahan hasil dan pemasaran. Sementara kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama baik oleh laki-laki maupun perempuan dalam pengelolaan hutan rakyat di

Kabupaten Banjarnegara lebih banyak dibandingkan dengan di Kabupaten Banyumas. Di Kabupaten Banyumas hanya akses terhadap hasil penjualan yang dilakukan bersama dengan nilai IKKG 0,80; sedangkan di Kabupaten Banjarnegara akses terhadap sumberdaya lahan (0,57) dan hasil penjualan (0,68) serta akses terhadap kegiatan pemeliharaan (0,58) dan penyiraman. (0,52).

Pada Tabel 4 dan 5 juga terlihat kontrol terhadap sumberdaya dan tahapan kegiatan di hutan rakyat di dominasi oleh

laki-laki. Kontrol yang didominasi perempuan di Kabupaten Banyumas terlihat pada tahapan pemasaran, sedangkan di Kabupaten Banjarnegara tidak ada sumberdaya maupun kegiatan yang didominasi perempuan, tetapi terdapat 3 variabel yang dilakukan bersama yaitu kontrol terhadap komoditas yang diusahakan, penyuluhan pertanian dan kontrol terhadap kegiatan pemupukan. Meskipun persentase responden yang menyatakan bahwa dalam melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri, namun disini peran istri juga sangat lemah yaitu hanya sebagai pendengar atau lebihnya sebagai pertimbangan, pengambil keputusan tetap suami (Sari *et al.*, 2009).

Akses dan kontrol laki-laki dan perempuan yang berbeda tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut (Palit, 2009) faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan kontrol laki-laki dan perempuan terhadap sumberdaya dan manfaat terdiri dari dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Palit, 2009). Faktor internal mencakup umur, pendidikan formal, jumlah anggota keluarga, luas lahan/modal dan pendapatan. Faktor eksternal mencakup intensitas mengakses informasi dan keterlibatan dalam kelompok. Faktor penguasaan lahan rumah tangga, keikutsertaan suami-istri dalam kegiatan kelompok dan pengetahuan lokal suami istri dalam budidaya tanaman di lahan hutan mempengaruhi akses dan kontrol pada rumahtangga petani terlebih pada laki-laki. Sedangkan pada rumah tangga buruh tani, faktor-faktor tersebut tidak mempengaruhi akses dan kontrol atas sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan hutan rakyat (Rahmawati & Sunito, 2013).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pola relasi gender dalam pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Banyumas dan

Kabupaten Banjarnegara menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi dalam akses terhadap sumberdaya hutan rakyat seperti: lahan, komoditas yang diusahakan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan pertanian, modal, kredit, serta peralatan maupun akses terhadap tahapan kegiatan pengelolaan hutan rakyat seperti pengolahan lahan, pembibitan, pemupukan, pola tanam, pemeliharaan, serta pengendalian hama dan penyakit. Perempuan hanya lebih dominan dalam akses terhadap pengolahan pasca panen dan pemasaran. Pada aspek kontrol di Kabupaten Banyumas, perempuan mendominasi pada tahapan kegiatan pemasaran, sementara di Kabupaten Banjarnegara tidak ada dominasi baik pada sumberdaya maupun tahapan kegiatan pengelolaan hutan rakyat, namun kontrol terhadap komoditas yang diusahakan dan penyiraman, pemupukan dan pemasaran dilakukan secara bersama-sama.

B. Saran

Dominasi perempuan dalam pengelolaan hutan rakyat terutama pada penjualan hasil panen, pengolahan pascapanen dan pemasaran dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Memperhatikan peran sentral perempuan dalam pengelolaan hutan rakyat sehingga perempuan harus diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan tahapan kegiatan dalam pengelolaan hutan rakyat. Untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan hutan rakyat, diperlukan dukungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi/kabupaten) melalui pelibatan perempuan dalam penyuluhan/pelatihan seperti pelatihan tentang pengolahan pascapanen dan perluasan jaringan pemasaran untuk meningkatkan nilai tambah dari hutan rakyat. Selain itu juga perlu peningkatan keterlibatan perempuan dalam kegiatan dan kepengurusan kelompok tani, dimana selama ini perempuan biasanya hanya dilibatkan secara terbatas seperti

sebagai tenaga upahan dalam kegiatan/proyek kelompok.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry atas kesempatannya sehingga kegiatan penelitian ini dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Deere, C. D., Oduro, A. D., Swaminathan, H., & Doss, C. (2013). Property rights and the gender distribution of wealth in Ecuador, Ghana, and India. *The Journal of Economic Inequality*, 11, 249-265.
- E.W. Chirwa, E. W., Mvula, P. M., Dorward, A., & Matita., M. (2011). *Gender and Intrahousehold Use of Fertilizers in The Malawi Farm Input Subsidy Programme. Future Agriculture Working Paper 02*. Retrieved from <http://www.dfid.gov.uk>.
- Elizabeth, R. (2007). Pemberdayaan Wanita Mendukung Strategi Gender Mainstreaming dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian di Perdesaan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 25 (2), 126-135.
- Fakih, M. (2007). *Analisis gender & transformasi sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farmia, A. (2006). Peran perempuan indonesia dalam pembangunan Pertanian *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 2 (1), 35-41.
- Fauziyah, E., Firdaus, N., & Sanudin. (2013). *Pemilihan jenis dan pembagian peran dalam pengelolaan hutan rakyat berbasis HHBK*. Paper presented at the Seminar Nasional Hasil Penelitian HHBK, Mataram.
- Hartomo, W. (2007). Kebijakan Sistem Usahatani Berkelanjutan Responsif Gender di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.
- Hastuti, E. L. (2004). Hambatan sosial budaya dalam pengarusutamaan gender di Indonesia Retrieved from [http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffile s/WP_50_2004.pdf](http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/file s/WP_50_2004.pdf).
- Hesti, R. W. (2012). Identifikasi Kebutuhan Teknologi Pertanian dalam Usaha Pertanian Semi-arid Menurut Perspektif Petani Perempuan: Tantangan Bagi Peneliti. Retrieved from <http://hartapplcng.blogspot.com/2012/04/identifikasi-kebutuhan-teknologi.html>
- Johnson, N. L., Kovarik, C., Meinzen-Dick, R., Njuk, J., & Quisumbing, A. (2016). Gender, assets, and agricultural development: lessons from eight projects *World Development*, 83, 295-311.
- Palit, M. A. (2009). *Status dan peran wanita etnik papua dalam pengambilan keputusan rumah tangga di Distrik Sentani Kabupaten Sentani Provinsi Papua*. . (Tesis), Institut Pertanian Bogor. , Bogor.
- Rahmawati, F., & Sunito, M. A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan kontrol laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sumberdaya hutan rakyat (Studi: Desa Gunung Bunder II, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Desember 2013, 206-221.
- Ruth Meinzen-Dick, Johnson, N., Quisumbing, A., Jemimah Njuki, Behrman, J., Rubin, D., . . . Waithanji., E. (2011). *Gender, assets, and agricultural development programs: a conceptual framework* Retrieved from Washington, DC:

- Sari, A. I., Purnomo, S. H., & Rahayu, E. T. (2009). Sistem pembagian kerja, akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi dalam keluarga peternak rakyat sapi potong di Kabupaten Grobogan. *Sains Peternakan*, 7 (1) Maret 36-44.
- Smale, M. (2011). *Does household headship affect demand for hybrid maize seed in kenya? an exploratory analysis based on 2010 survey data.* . Retrieved from East Lansing, MI.:
- Wahyuni, E. S. (2007). Perempuan petani dan penanggulangan kemiskinan. *Agrimedia*, 12 (1).
- World_Bank. (2012). *Gender Equality and Develonpment.* Retrieved from Washington, DC:
- Yuwono, D. M. (2013). Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Pertanian: Kasus Pada Pelaksanaan Program Feati Di Kabupaten Magelang. *Badan Pengkajian Teknologi Pertanian. Jawa Tengah. SEPA*, 10(1), 140-147.